



LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Ngeposari)

Nomor : 5

Tahun : 2025

---

PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngeposari Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 3 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 12 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 2022 tentang Penugasan urusan Keistimewaan;
- 13 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
- 14 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 18 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
- 22 Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
- 23 Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
- 24 Peraturan Desa Ngeposari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 5);

- 25 Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
- 26 Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);
- 27 Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngeposari Tahun 2022-2027;
- 28 Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI

Dan

LURAH NGEPOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai Berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.341.687.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	4.225.699.772,00
<i>Surplus/ (Defisit)</i>	<i>Rp</i>	<i>115.987.228,00</i>
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	142.412.772,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	258.400.000,00
<i>Selisih Pembiayaan</i>	<i>Rp</i>	<i>(115.987.228,00)</i>
SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngeposari

Ditetapkan di Ngeposari  
pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH NGEPOSARI,

ttd

C I P T A D I

Diundangkan di Ngeposari  
pada tanggal 29 Desember 2025

CARIK NGEPOSARI,

ttd

ALIFTA ZULAIKHA, S.Pd

LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2025 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.238.287.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.341.687.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.148.333.420,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.363.343.352,00	
5.3.	Belanja Modal	1.640.623.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.225.699.772,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>115.987.228,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	142.412.772,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	142.412.772,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	258.400.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	258.400.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(115.987.228,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ngeposari, 29 December 2025

LURAH

CIPTADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.238.287.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.341.687.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.651.831.597,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.320.116.852,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	969.493.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	969.493.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.065.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	63.065.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	83.436.432,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.436.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.064.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.064.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.505.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.505.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.642.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.642.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>175.640.400,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.425.400,00	DLL, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	128.565.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	128.565.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.600.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.600.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	22.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.866.845,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	28.801.000,00	PAD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.786.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.015.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.090.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	490.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.485.845,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.845,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>110.017.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.675.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.675.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.410.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.099.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.099.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.862.000,00	PBH, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.862.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.550.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.116.000,00	DLL, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.116.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.125.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.730.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	12.450.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.190.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.190.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.095.774.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.490.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	74.490.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.490.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>189.040.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.500.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	39.630.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.630.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.285.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.285.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.705.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.705.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.920.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>126.358.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	88.055.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	88.055.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	16.695.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	16.695.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	21.608.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	21.608.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>557.875.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	542.875.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.875.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>1.144.011.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1.118.641.000,00	DDS, PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.118.641.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	21.320.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.320.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.050.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>60.290.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.075.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.075.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.935.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	18.935.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.935.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.800.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>29.480.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	8.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11.950.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.940.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.690.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>344.404.175,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>19.300.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	19.300.000,00	DDS, DLL
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>60.400.175,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	55.975.175,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.975.175,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.425.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>25.625.000,00</b>	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.075.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.550.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>26.435.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	16.360.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.075.000,00	DDS, PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.075.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>212.644.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.944.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.944.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	11.700.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>73.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>68.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.225.699.772,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>115.987.228,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	142.412.772,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	258.400.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(115.987.228,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ngeposari, 29 December 2025

LURAH

CIPTADI